



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Pemkab Pasuruan Berkomitmen Pertahankan WTP Melalui Pengelolaan Keuangan Berkualitas dan Akuntabel



Jumat, 23 Juni 2023

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam menanggapi apresiasi dari Fraksi PKB dan Gerindra

terhadap capaian WTP pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan.

Wakil Bupati menjelaskan bahwa komitmen ini tercermin dalam penerapan tata kelola keuangan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelaksanaan pembangunan yang nyata dengan hasil yang aktual. Ia juga memaparkan korelasi antara penyerapan belanja daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari 68,93 pada tahun 2021 menjadi 69,68 pada tahun 2022. Seiring dengan itu, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 9,70 persen pada tahun 2021 menjadi 8,96 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan anggaran berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa penurunan signifikan pada komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2022 disebabkan oleh perubahan klasifikasi kode rekening pendapatan, khususnya terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun terdapat perbedaan klasifikasi, secara substantif nilai pendapatan tetap sama.

Terkait realisasi belanja, Wakil Bupati menyebutkan bahwa kenaikan persentase realisasi belanja disebabkan oleh penambahan pagu belanja dana terikat pada tahun 2022, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Hal ini membutuhkan penyesuaian di tengah tahun anggaran berjalan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.